

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Sejarah Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan perubahan perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi nama wilayah ini. Begitu juga hukum sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya.

Memang masih ada beberapa bukti tertulis yang berkembang di masyarakat, seperti tulisan pada daun lontar atau Layang Madura, namun tulisan tersebut lebih menceritakan tentang Nabi (Rasul) dan sahabatnya, termasuk juga ajaran-ajaran agama sebagai salah satu sumber pelajaran agama bagi masyarakat luas. Pamekasan mulai terungkap sekitar paruh kedua ke-16, ketika pengaruh Mataram mulai masuk di Madura, terlebih dahulu ketika Ronggosukowati mulai mereformasi pemerintahan dan pembangunan wilayahnya. Hal ini terjadi dengan pembuatan jalan Se Jimat, yaitu jalan-jalan di Alun-alun kota Pamekasan dan menentukan Masjid Jamik Pamekasan. Namun, sampai saat ini masih belum bisa ditemukan adanya inskripsi ataupun prasasti pada beberapa situs peninggalannya untuk menentukan kepastian tanggal dan bulan pada saat pertama kali memerintah Pamekasan.

Sejarah Pamekasan semakin ada titik terang setelah berhasilnya invansi Mataram ke Madura dan merintis pemerintahan local di bawah pengawasan Mataram. Masa-masa berikutnya lebih cerah karena telah banyak tulisan berupa hasil penelitian berdasarkan tulisan-tulisan sejarah Madura termasuk Pamekasan, masa campur tangan pemerintahan Belanda yang sempat menimbulkan pro dan kontra bagi para penguasa Madura, dan menimbulkan peperangan Pangeran Trunojoyo dan Ke'Lesap.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, Pamekasan untuk perkembangan politik nasional tidak menguntungkan, tapi disisi lain para penguasa Pamekasan seperti pada pepatah Buppa', Babu', Guru, Rato telah banyak digunakan. Perkembangan Pamekasan, walaupun tidak terlalu banyak bukti tertulis berupa manuskrip maupun inskripsi yang memiliki peran yang cukup penting pada pertumbuhan wilayah ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, melihat dari tangga bahkan tidak ada sama sekali prasasti maupun inskripsi sebagai sumber, maka data-data atau fakta yang digunakan untuk menganalisis peristiwa yang terjadi tetap diupayakan menggunakan data-data sekunder berupa buku-buku sejarah atau Layang Madura yang memiliki tampilan peristiwa dengan kejadian sejarah yang ada. Selain itu diupayakan menggunakan data primer atau data dari beberapa informan kunci yaitu para sesepuh Pamekasan.

a. Visi dan Misi

1) Visi Kabupaten Pamekasan

Terwujudnya Pamekasan yang Maju, Berdaya Mandiri, Berkeadilan, Aman, dan Sejahtera Menuju Ridho Allah SWT.

2) Misi Kabupaten Pamekasan

- Memperluas pendidikan berbasis potensi daerah dan pemerataan kualitas pendidikan.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan hidup bersih dan sehat melalui peningkatan fasilitas layanan kesehatan.
- Mempercepat pembangunan infrastruktur publik.
- Meningkatkan pembangunan bidang ekonomi dengan prioritas sector pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan.
- Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel).
- Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah.

b. Agama Penduduk Kabupaten Pamekasan

Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Pamekasan adalah agama islam. Masyarakat Pamekasan pada kenyataannya adalah masyarakat yang religius, baik dalam ketaatannya melaksanakan ibadah sehari-hari, pelangsungan tradisi dalam siklus kehidupan, keterkaitan dengan petunjuk dan fatwa para Kyai

dan tersebarnya sekolah-sekolah agama di berbagai pelosok, seperti pondok pesantren dan madrasah.

c. Monografi Kabupaten Pamekasan

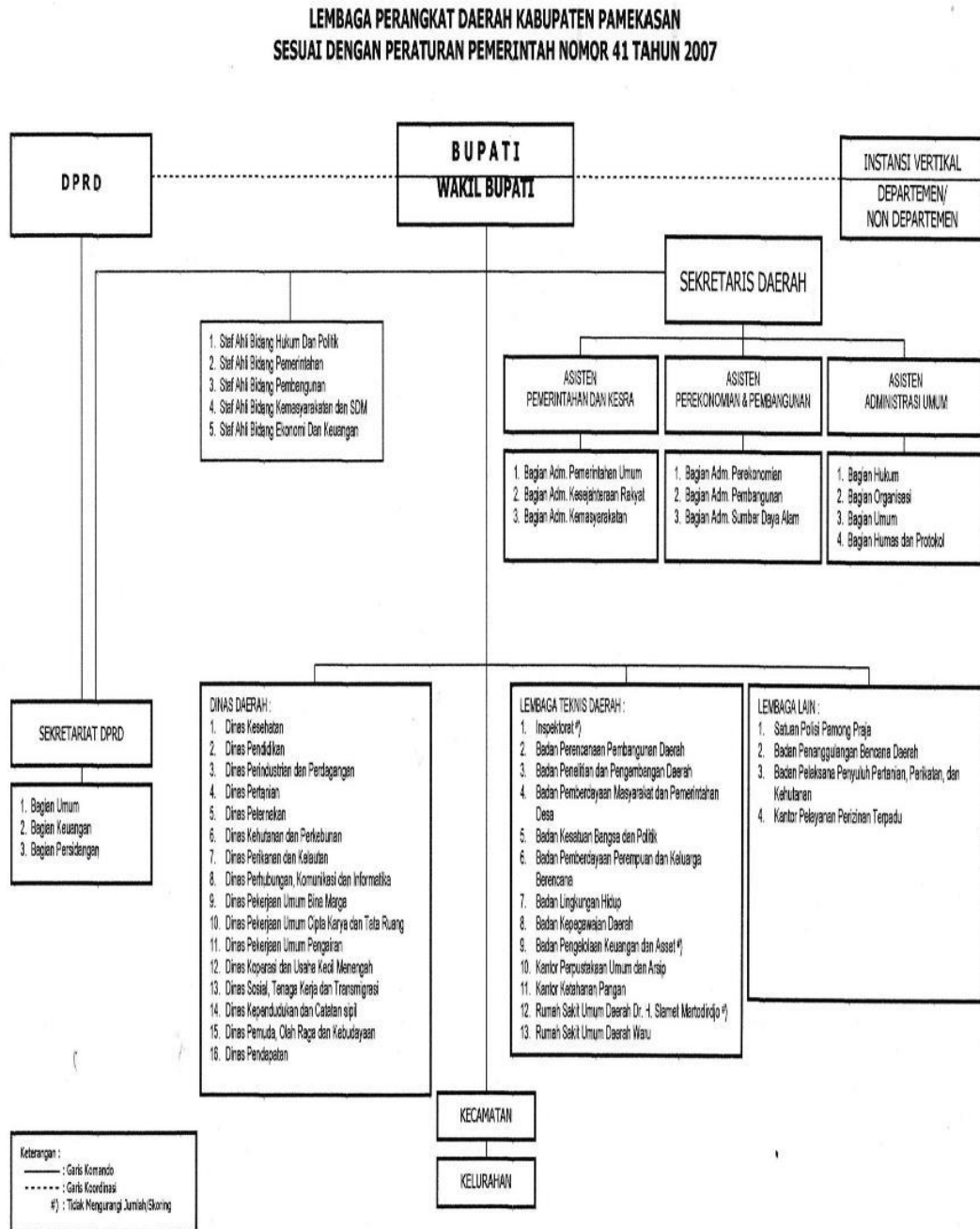
Adapun monografi Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

- 1) Nama Wilayah : Kabupaten Pamekasan.
- 2) Provinsi : Jawa Timur.
- 3) Ibu Kota : Pamekasan.
- 4) Jumlah penduduk : 818.662 jiwa.
- 5) Kode Telepon : 0324
- 6) Kode Kemendagri : 35.28
- 7) Luas wilayah : 79.230 Ha.
- 8) Jumlah Kecamatan : 13
- 9) Jumlah Kelurahan : 178 Desa dan 11 Kelurahan.
- 10) Secara astronomis : $6^{\circ} 51' - 7^{\circ} 31' \text{ LS}$ dan $113^{\circ} 19' - 113^{\circ} 58' \text{ BT}$.
- 11) Batas wilayah
 - Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Sebelah Timur : Kabupaten Sumenep
 - Sebelah Selatan : Selat Madura
 - Sebelah Barat : Kabupaten Sampang

d. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Adapun struktur lembaga perangkat daerah Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Gambar 4.1



2. Penerapan Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang akan dikelola untuk mendanai suatu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ada 3 jenis, seperti penuturan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

DAK itu Dana Alokasi Khusus ada 3 jenis, yaitu Reguler, Penugasan, dan Afirmasi. DAK Reguler ini DAK yang harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi program prioritas atau target daerah. Kalau DAK Penugasan yaitu DAK yang digunakan oleh daerah untuk mendukung kualitas nasional. Sedangkan DAK Afirmasi adalah DAK untuk wilayah atau daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan (Kabupaten Pamekasan tidak termasuk).¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menyebutkan jika, Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 3 jenis, yang pertama DAK Reguler yang digunakan untuk memenuhi program prioritas atau target daerah. Yang kedua, DAK Penugasan yang digunakan untuk mendukung kualitas nasional. Sedangkan yang terakhir, DAK Afirmasi untuk wilayah atau daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan akan tetapi Kabupaten Pamekasan tidak termasuk kedalamnya.

¹ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Dilihat dari data wawancara diatas dapat diketahui jika jenis-jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) itu ada 3, (1) DAK Reguler yang digunakan untuk memenuhi dan membiayai prioritas atau target daerah yang ada, contohnya puskesmas, tehnik kesehatan, pendidikan, bangun rehab gedung sekolah, bangun jalan, dan lain sebagainya. (2) DAK Penugasan yang digunakan untuk mendukung kualitas nasional, contohnya stunting yang di support oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). (3) DAK Afirmasi untuk menangani wilayah atau daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan. Kabupaten Pamekasan bukan lagi berstatus daerah tertinggal sejak 29 September 2014 sesuai dengan keputusan Menteri PDT Nomor 141/2014, karena Pamekasan masuk dalam 5 besar dengan indeks pembangunan manusia terbaik dan tertinggi diantara 3 Kabupaten lain di Pulau Madura.

Diketahui pula jika Dana Alokasi Khusus (DAK) akan turun atau dicairkan setiap tahun. Proses perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut bersifat T-1 yang artinya untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2021 sudah direncanakan di tahun 2020 sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

Proses perencanaan DAK itu sifatnya T-1 artinya untuk DAK 2020 sudah direncanakan di 2019, 2021 sudah direncanakan tahun 2020. Jadi, untuk 2022 kita sudah rencanakan tahun ini. Jadi periode normalnya mulai dari Mei-Oktober/ November. Jadi perencanaan itu mulai disusun. Selama 6 bulan itu memproses melalui usulan lewat aplikasi Krisna. Tahapan, penilaian dari provinsi, dan sinkronisasi. Bulan ini masuk tahap sinkronisasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara pemerintah daerah dengan pusat, artinya anggap kita mengusulkan jalan, misalnya jalan A itu di

diskusikan dengan kementerian setelah itu muncul lah panah di bulan Oktober, nah itu lah kita dapat.²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menyebutkan jika, Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut bersifat T-1. Untuk DAK tahun 2021 sudah direncanakan pada tahun 2020, begitu pula selanjutnya untuk tahun 2022 sudah direncanakan tahun 2021. Tahap perencanaannya berlangsung selama 6 bulan yang diusulkan melalui aplikasi Krisna. Mulai dari tahapan, penilaian dari provinsi, dan sinkronisasi. Pada bulan ini yaitu Agustus sedang memasuki tahap sinkronisasi Antara pemerintah daerah dengan pusat. Apabila di aplikasi Krisna sudah muncul panah artinya Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut berhasil di dapatkan atau disetujui.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus pada tahun 2020 sudah direncanakan pada tahun sebelumnya, begitupula untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini melalui beberapa proses, yang pertama yaitu tahapan, yang kedua penilaian dari provinsi, dan yang ketiga sinkronisasi antara pemerintah daerah dengan pusat. Pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui aplikasi Krisna. Krisna ini adalah Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran dengan mengintegrasikan sistem dari 3 kementerian, yaitu Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta

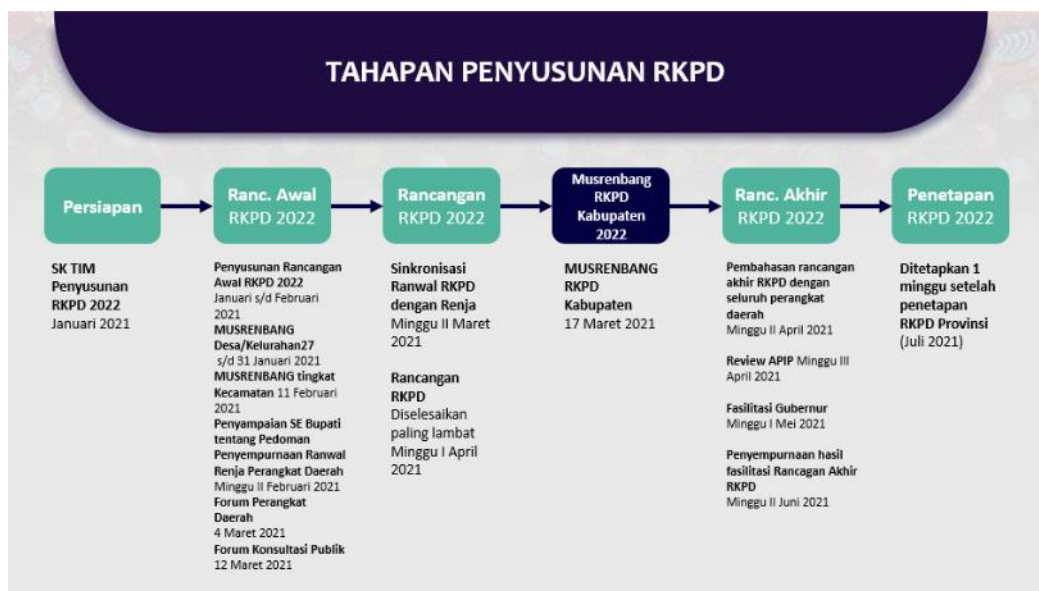
² Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

pelaporan informasi kerja. Jadi, apabila Dana Alokasi Khusus yang sudah diusulkan sudah disetujui maka di dalam aplikasi Krisna akan muncul notifikasi panah.

Pengusulan bidang/ kegiatan yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap daerah melewati beberapa sistem dan proses, seperti penuturan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

Semua alur itu lewat Musrenbang mulai tingkat desa, dari desa itu masuk ke Kecamatan terus masuk ke kota, nah dari situ kan banyak sumber pendanaan, jadi kita rekap semua usulan itu nanti bisa kita lihat prioritasnya yang mana, misalkan jalan ini masuk prioritas, nah kita lihat apa ini masuk pendanaan reguler APBD atau lewat DAK atau yang lainnya. Kalau bicara sistem perencanaannya, alurnya itu mulai dari Musrenbangdes, abis itu kita pilah. Ada survey ke tempat langsung ketika sudah menjadi prioritas.³

Gambar 4.2



Sumber: Musrenbang RKPDP Pamekasan 2022.

³ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menuturkan bahwa, alur jalannya pengusulan suatu kegiatan/ bidang yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) ini yang pertama melewati Musrenbang tingkat desa atau Musrenbangdes. Setelah itu, dari Musrenbangdes dilanjutkan ke Kecamatan, dan sampai kepada pihak Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK). Melihat banyaknya sumber pendanaan yang ada, pihak PPTK merekap usulan yang telah masuk dan memilih mana yang menjadi prioritas. Misalnya, pada bidang infrastruktur bangun jalan yang sudah menjadi prioritas akan dilihat apakah masuk pada pendanaan reguler Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pendaan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun yang lainnya. Apabila bicara mengenai sistem perencanaan alur Dana Alokasi Khusus (DAK), dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), setelah itu dari pihak PPTK memilah mana kebutuhannya yang menjadi prioritas. Juga akan ada survey lapangan apabila kegiatan/ bidang tersebut kebutuhannya sudah menjadi prioritas.

Dilihat dari data diatas bahwa pengusulan untuk bidang/ kegiatan yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap daerah melewati beberapa proses. Untuk tahun 2022 pengusulannya sudah direncanakan di tahun 2021 ini, dapat diketahui bahwa yang pertama kali dilakukan adalah dengan melakukan persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah dilakukan pada bulan Januari kemarin. Selanjutnya adalah melakukan rancangan awal RKPD untuk

tahun 2022, dengan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk penetapan RKPD 2022 ini. Setelah dilakukannya Musrenbang desa dan dilanjut dengan Musrenbang tingkat kecamatan rancangan RKPD sudah diselesaikan pada tanggal 1 April 2021. Dilanjut dengan Musrenbang Kabupaten yang akan menghasilkan rancangan akhir RKPD tahun 2022. Setelah rancangan akhir, RKPD 2022 ditetapkan 1 minggu setelah penetapan RKPD Provinsi pada bulan Juli 2021 mendatang. Berikut adalah hasil dari Rencana Kerja program prioritas pokok pembangunan daerah tahun 2022.

Gambar 4.3
Rencana Kerja Tahun 2022
Bidang Pendidikan



PENDIDIKAN

ACAR
Anak Cerdas dan Anak Pintar

SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Bagian Kesra
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nontomal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

PENDIDIKAN	
SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan Dan Kearsifan

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Gambar 4.4

Rencana Kerja Tahun 2022

Bidang Kesehatan

SEHATI (KESEHATAN GRATIS)	
SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP3AP2KB
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	DP3AP2KB

SEHATI
Kesehatan Gratis



SEHATI (KESEHATAN GRATIS)	
SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Penyediaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UFPKS)	DP3AP2KB
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UFPKS)	DP3AP2KB
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UFPKS)	DP3AP2KB
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DP3AP2KB
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	DISPORAPAR
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	DISPORAPA
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	DISPORAPA
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	DISPORAPA
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	DISPORAPAR

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Gambar 4.5
Rencana Kerja Tahun 2022
Bidang Infrastruktur Jalan

RUJAK COREK (Infrastruktur Jalan dan Jembatan)	
SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Pembangunan Jalan	PUPR
Rehabilitasi Jalan	PUPR
Pemeliharaan Berkala Jalan	PUPR
Penggantian Jembatan	PUPR
Pemeliharaan Berkala Jembatan	PUPR
Pemeliharaan Rutin Jalan	PUPR
Pemeliharaan Rutin Jembatan	PUPR
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	PERKIM
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	PERKIM
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	PERKIM
Penataan Bangunan dan Lingkungan	PERKIM
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	PERKIM
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PERKIM
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	PERKIM
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PERKIM
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	PERKIM

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Gambar 4.6
Rencana Kerja Tahun 2022
Bidang Pertanian

TANEAN LANJENG (Petani dan Nelayan Sejahtera dan Bahagia)	
SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP PERTANIAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	DKP PERTANIAN
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup dim 1 (satu) Daerah Kab/Kota	DKP PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DKP PERTANIAN
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	DKP PERTANIAN
Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	DKP PERTANIAN
Perjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	DKP PERTANIAN
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	DKP PERTANIAN
Pemanfaatn SDG Hewan/Tanaman	DKP PERTANIAN
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	DKP PERTANIAN
Perjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	DKP PERTANIAN
Perjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	DKP PERTANIAN
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonis	DKP PERTANIAN
Peranggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	DKP PERTANIAN
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	PUPR



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Gambar 4.7
Rencana Kerja Tahun 2022
Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah

SAPU TANGAN BIRU (Pembinaan Sepuluh Wirausaha Baru dan Calon Pengusaha Baru)	
SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	DR/MP/TP DAN NAKER
Protes Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	DR/MP/TP DAN NAKER
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DR/MP/TP DAN NAKER
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DR/MP/TP DAN NAKER
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	DR/MP/TP DAN NAKER
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	DISKOP UKM
fasilitasi Usaha Mikro Menjadi usaha kecil dalam Pengembangan Produk dan Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DISKOP UKM
Koordinasi, sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Peningkatan Industri	DISPERINDAG
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemoangan Sumber Daya Industri	DISPERINDAG
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan sarana dan Prasarana Industri	DISPERINDAG
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemoerayaan Industri dan Peran serta Masyarakat	DISPERINDAG
fasilitasi Pengelolaan sarana Distribusi Perdagangan	DISPERINDAG
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	DISPORAPAR
Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	DISPORAPAR



Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Melihat dari data diatas yang diperoleh dan ditemukan oleh peneliti, sudah ada bukti bahwa dari hasil kesepakatan rapat rancangan akhir RKPD ini sudah menyetujui beberapa program maupun kegiatan yang menjadi prioritas pokok dari pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini.

Dan juga menurut penuturan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator: “Untuk usulan 2022, tahap perencanaan mulai di Januari 2021 sudah mengadakan Musrenbang. Tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Sekarang sudah masuk tahapan Musrenbang Kabupaten sudah selesai, nanti ada Musrenbang Provinsi, Nasional. Dari Musrenbang itu kita menyusun RKPD, mana usulan yang masuk ke usulan-usulan tersebut, misalnya jalan, jalan itu kan banyak ada sekitar kurang lebih 500 ruas jalan, kita nanti yang mana yang akan masuk ke DAK, karena DAK tidak bisa sembarangan. DAK ada kriterianya, yaitu tidak boleh jalannya putus harus tuntas, apabila di satu jalan sudah diusulkan maka tahun depan dipantau jalan tersebut sudah selesai tidak bisa diusulkan lagi, harus pindah ke jalan yang lain. Tidak bisa sembarangan, disitu akan ditolak secara sistem, karena selain usulan kita masukkan data base. Ada pemilihan ketika kita mengusulkan DAK tidak bisa semua masuk, dan juga dibatasi oleh Pagu dan menunya juga terbatas”.⁴

Gambar 4.8

Rapat Sosialisasi DAK



⁴ Wowok Prabowo, Staf Operator, *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).



Sumber: Data Dokumentasi Rapat Sosialisasi DAK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator menuturkan bahwa, tahap perencanaan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dimulai pada bulan Januari tahun 2021, dan sudah melakukan Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Saat ini, di bulan Maret sedang masuk pada tahapan sudah melewati Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, akan ada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dari Musrenbang tersebut dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang biasa disebut RKPD. Misalnya, pada bidang infrastruktur bangun jalan, terdapat kurang lebih sekitar 500 ruas jalan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Lalu oleh pihak PPTK dipilah mana yang akan di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK), dikarenakan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini tidak dapat sembarangan. Dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat beberapa kriteria, yaitu bangun jalan tidak boleh putus dan harus tuntas, dan apabila di suatu ruas jalan sudah pernah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maka di tahun selanjutnya tidak dapat diusulkan lagi. Apabila usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini sembarangan, maka akan ditolak secara otomatis oleh sistem.

Ada pemilahan ketika pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak semua yang diusulkan dapat masuk karena dibatasi oleh Pagu dan juga menunya terbatas.

Dari data diatas diketahui bahwa alur jalannya pengusulan suatu kegiatan/ bidang yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) ini yang pertama melewati Musrenbang tingkat desa atau Musrenbangdes. Setelah itu, dari Musrenbangdes dilanjutkan ke Kecamatan, dan sampai kepada pihak Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK). Apabila bicara mengenai sistem perencanaan alur Dana Alokasi Khusus (DAK), dimulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), setelah itu dari pihak PPTK memilah mana kebutuhannya yang menjadi prioritas. Juga akan ada survey lapangan apabila kegiatan/ bidang tersebut kebutuhannya sudah menjadi prioritas. Tahap perencanaan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2022 dimulai pada bulan Januari tahun 2021, dan sudah melakukan Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya, akan ada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dari Musrenbang tersebut dapat menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang biasa disebut RKPD pada data diatas yang dibagi dalam beberapa bidang yang menjadi program prioritas pembangunan daerah di tahun 2022 yang sudah direncanakan dan disusun di tahun 2021. Ada pemilahan ketika pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK), tidak semua yang diusulkan dapat masuk karena dibatasi oleh Pagu dan juga menunya terbatas. Pagu ini sendiri adalah alokasi anggaran yang disediakan untuk dana belanja pemerintah pusat atau pembiayaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tabel 4.1

PAGU DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO	BIDANG	SKPD PELAKSANA	PAGU ANGGARAN DAK	ALOKASI SESUAI	PAGU ANGGARAN DAK	TOTAL PAGU ANGGARAN	TOTAL PAGU ANGGARAN
			REGULER AWAL (RP)		PERPRES 107/2017		
1	2	3	2018		2018	2018	2018
1	Pendidikan SD/SDLB	Dinas Pendidikan	13.205.000,00,00	13.205.382,00,00	0,00	13.205.000,00,00	13.205.382,00,00
		Pendidikan SMP	12.036.000,00,00	12.035.573,00,00	0,00	12.036.000,00,00	12.035.573,00,00
2	Pelayanan Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan	6.463.000,00,00	6.462.868,00,00	0,00	6.463.000,00,00	6.462.868,00,00
		Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	5.262.000,00,00	5.261.783,00,00	0,00	5.262.000,00,00	5.261.783,00,00
3	Pelayanan Rujukan	RSUD	6.449.000,00,00	6.449.387,00,00	0,00	6.449.000,00,00	6.449.387,00,00
4	Keluarga Berencana	DP3A & KB	484.000,00,00	483.999,00,00	0,00	484.000,00,00	483.999,00,00
5	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.437.000,00,00	2.436.755,00,00	0,00	2.437.000,00,00	2.436.755,00,00
		Air Minum	1.127.000,00,00	1.126.596,00,00	1.000.000,00,00	2.127.000,00,00	2.126.596,00,00
	Sanitasi		1.583.000,00,00	1.583.137,00,00	5.298.000,00,00	6.881.000,00,00	6.881.137,00,00
6	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan	1.683.000,00,00	1.683.000,00,00	0,00	1.683.000,00,00	1.683.000,00,00
		Dinas Pertanian	2.506.000,00,00	2.505.992,00,00	0,00	2.506.000,00,00	2.505.992,00,00
8	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	0,00	0,00
		Armenitas Pariwisata	-	-	-	0,00	0,00
9	Sentra Industri Kecil dan Menengah	DISPERINDAG	-	-	-	0,00	0,00
	Pasar		-	-	2.780.000,00,00	2.780.000,00,00	2.780.000,00,00
10	Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan	Dinas PU dan Penataan Ruang	17.241.000,00,00	17.240.836,00,00	-	17.241.000,00,00	17.240.836,00,00
	Irigasi		-	-	4.041.000,00,00	4.041.000,00,00	4.041.000,00,00
JUMLAH			70.476.000,00,00	70.475.308,00,00	13.119.000,00,00	83.595.000,00,00	83.594.308,00,00

Sumber: Data Pagu DAK anggaran 2018.

Tabel 4.2

Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK)

Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019

NO	BIDANG	SUB BIDANG	SKPD PELAKSANA	PAGU ANGGARAN 2019		TOTAL PAGU 2019
				REGULER	PENUGASAN	
1	2	3	4	6	7	8
1	PENDIDIKAN			45.814.307,00,00		45.814.307,00,00
		Pendidikan SD/SDLB	Dinas Pendidikan		24.959.407,00,00	
		Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan		18.682.900,00,00	
		SKB			200.000,00,00	
		Perustakaan Daerah			1.972.000,00,00	
2	KESEHATAN			18.025.591,00,00	2.645.966,00,00	20.671.557,00,00
		Pelayanan Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan		3.324.999,00,00	
		Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	Dinas Kesehatan		5.538.944,00,00	
		Pelayanan Rujukan	RSUD		8.823.842,00,00	
		Keluarga Berencana	DP3A & KB		337.806,00,00	
		Penunangan Intervensi Stunting				1.264.999,00,00
		Penurunan stunting				1.380.967,00,00
perencanaan sanitasi						
3	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.203.093,00,00		3.203.093,00,00
		Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.870.718,00,00	700.000,00,00	2.570.718,00,00
4	SANITASI			600.000,00,00	6.300.000,00,00	6.900.000,00,00
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN			1.591.285,00,00		1.591.285,00,00
6	PERTANIAN			1.793.777,00,00		1.793.777,00,00
8	SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH			2.613.897,00,00		2.613.897,00,00
9	PARIWISATA	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
		Armenitas Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
10	LINGKUNGAN HIDUP					
11	PASAR				4.686.588,00,00	4.686.588,00,00
12	JALAN					14.017.967,00,00
13	IRIGASI	Dinas Perhubungan				4.650.561,00,00
		Dinas PU dan Penataan Ruang		14.017.967,00,00		14.017.967,00,00
					4.650.561,00,00	4.650.561,00,00
JUMLAH				153.370.533,00,00	18.983.115,00,00	172.353.648,00,00

Sumber: Data Pagu DAK anggaran 2019.

Tabel 4.3

PAGU ALOKASI DAK FISIK
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2020 BERDASARKAN PERPRES 72 TAHUN 2020

NO	BIDANG	SUB BIDANG	REGULER			PENUGASAN		
			PAGU AWAL	PEMOTONGAN COVID-19 (PMK.35/PMK.07/2020)	DAK CADANGAN (Perpres 72/2020)	PAGU AWAL	PEMOTONGAN COVID-19 (PMK.5/PMK.07/2020)	DAK CADANGAN (Perpres 72/2020)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDIDIKAN		33.067.311.000,00	33.067.311.000,00				
		Pendidikan SD/SOLB	16.411.116.000	16.411.116.000				
		Pendidikan SMP	16.254.831.000	16.254.831.000				
		SKB	401.364.000	401.364.000				
2	KESEHATAN		8.591.480.000,00	8.591.480.000,00		6.090.974.000,00	6.090.974.000,00	
		Pelayanan Kesehatan Dasar	616.276.000	616.276.000				
		Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	2.852.500.000	2.852.500.000				
		Pelayanan rujukan	4.281.222.000	4.281.222.000				
		Keluarga Berencana	841.482.000	841.482.000				
		Penguatan Intervensi Stunting				961.301.000,00	961.301.000,00	
		Penurunan stunting				85.000.000,00	85.000.000,00	
		Pengendalian penyakit				5.044.673.000,00	5.044.673.000,00	
3	PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Perumahan	2.375.488.000	2.375.488.000				
4	AIR MINUM	Air Minum				1.000.112.000,00	990.770.000,00	
5	SAHITASI	Sanitasi	2.573.360.000			6.879.198.000,00		1.419.198.000,00
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kabupaten dan Perikanan				1.719.453.000,00		1.719.453.000,00
7	PERTANIAN	Pertanian				900.000.000,00		
8	SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Sentra Industri Kecil dan Menengah				7.871.300.000,00		5.621.300.000,00
9	LINGKUNGAN HIDUP					2.670.000.000,00	130.696.000,00	
10	JALAN	Keselamatan Jalan				317.180.000,00		
		Jalan	14.485.212.000		3.285.212.000			
11	TRIGAST					2.518.016.000,00		2.518.016.000,00
		Trigasi				2.518.016.000,00		
		JUMLAH	61.092.951.000,00	44.034.279.000,00	3.285.312.000,00	29.966.233.000,00	7.212.440.000,00	11.277.967.000,00
		TOTAL DAK REGULER			47.219.591.000,00			
		TOTAL DAK PENUGASAN						18.490.407.000
		TOTAL DAK CADANGAN						14.563.279.000
		TOTAL PAGU DAK 2020						80.373.277.000

Sumber: Data Pagu DAK anggaran 2020.

Melihat dari data Pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2018-2020 terkait dengan baku anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk setiap tahunnya berbeda sesuai dengan prioritas kebutuhan yang ada, sesuai dengan yang dipaparkan oleh Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

Dana DAK sudah lumayan besar untuk membantu perkembangan di Pamekasan, terkait dengan DAK untuk baku anggaran tiap tahunnya berbeda tergantung kebutuhannya, kebutuhan itu diusul ke pusat dengan mengumpulkan OPD melalui program Krisna untuk mengusulkan dana DAK. Contoh, air minum kita bangun pengeboran di Desa Bujhur. Jumlah penduduk berpengaruh dalam peningkatan DAK.⁵

⁵ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menuturkan bahwa, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan sudah dikatakan cukup besar untuk membangun perkembangan daerah ini. Untuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) ini selalu berbeda setiap tahunnya, bergantung pada kebutuhan yang ada. Kebutuhan tersebut diusulkan ke pusat dengan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui aplikasi Krisna. Contohnya, pada bidang air minum dibangun pengeboran sumber mata air di Desa Bujhur. Jumlah penduduk sangat berpengaruh terhadap peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dapat diketahui bahwa, Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan sudah dapat dikatakan baik untuk membangun perkembangan pembangunan daerah. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di setiap tahunnya berbeda karena tiap tahun berbeda pula prioritas kebutuhannya. Kebutuhan tersebut diusulkan melalui aplikasi Krisna dengan mengumpulkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jumlah penduduk sangat mempengaruhi peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Setelah Dana Alokasi Khusus disetujui oleh pemerintah daerah dan pusat, maka proses pencairannya atau penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut melalui transfer daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Melalui

peraturan tersebut, penyaluran atau realisasi Dana Alokasi Khusus menjadi lebih sederhana.

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menuturkan: “Penerimaan DAK itu mbak adalah dengan melalui transfer daerah. Uang dari pusat itu di transfer ke daerah ke rekening APBD. Dan juga pusat itu mentransfer sesuai dengan kebutuhan yang ada mbak. Tapi, untuk tahun 2020 ini kan dana DAK di fokuskan pada penanganan COVID-19 yaitu pada bidang kesehatan. Kegiatan/ bidang yang sudah tandatangan kontrak atau yang sudah mau dilaksanakan tetap dilanjutkan mbak, tetapi setelah ada perubahan APBN bulan Juli kemarin ada beberapa bidang yang dibuka lagi namanya DAK cadangan, bidang sanitasi, bidang IKM, bidang irigasi, bidang jalan tapi tidak full mbak, anggap dapat anggaran 1 Miliar kita dapatnya hanya sebagian saja”.⁶

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan mengungkapkan bahwa, Pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini melalui transfer daerah, lalu uang dari pusat di transfer ke rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan juga pemerintah pusat mencairkan dan mentransfer Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan. Akan tetapi, untuk tahun anggaran 2020 Dana Alokasi Khusus (DAK) di fokuskan pada penanganan COVID-19 yang termasuk dalam bidang kesehatan. Dan apabila ada kegiatan/ bidang selain dalam bidang kesehatan yang sudah mengalami tandatangan kontrak untuk dilaksanakan dan sudah siap untuk tahap pengerjaan maka tetap dilanjutkan. Setelah adanya perubahan APBN pada bulan Juli, terdapat beberapa bidang yang juga dilanjutkan selain bidang kesehatan yang

⁶ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

bernama DAK cadangan, yaitu pada bidang sanitasi, bidang IKM (Industri Kecil Menengah), bidang irigasi, bidang jalan, dan sebagainya. Akan tetapi dana yang diterima tidak penuh hanya sebagian saja karena mengalami penyederhanaan realisasi Dana Alokasi Khusus yang difokuskan untuk bidang kesehatan dalam hal penanganan pandemi COVID-19.

Dilihat dari data diatas penyaluran Dana Alokasi Khusus melalui transfer daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan transfer daerah difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini terdapat beberapa bidang, terutama bidang kesehatan yang termasuk di dalamnya penanganan pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, beberapa bidang yang lain mengalami penyederhanaan realisasi dana DAK guna untuk memfokuskan pada penanganan COVID-19 ini.

Tabel 4.4

Perbandingan Alokasi DAK Kabupaten Pamekasan

Tahun Anggaran 2018-2020

NO	BIDANG	PAGU ANGGARAN 2018	PAGU ANGGARAN 2019	PAGU ANGGARAN 2020
1	Pendidikan	25.240.955.000,00	45.814.307.000,00	33.067.311.000,00
2	Kesehatan	18.658.037.000,00	20.671.557.000,00	14.682.454.000,00
3	Perumahan dan Permukiman	2.436.755.000,00	3.203.093.000,00	2.375.488.000,00
4	Air Minum	2.126.596.000,00	2.570.718.000,00	1.000.112.000,00
5	Sanitasi	6.881.137.000,00	6.900.000.000,00	9.452.558.000,00

6	Kelautan dan Perikanan	1.683.000.000,00	1.591.285.000,00	1.719.453.000,00
7	Pertanian	2.505.992.000,00	1.793.777.000,00	900.000.000,00
8	Sentra Industri Kecil dan Menengah	0,00	2.613.897.000,00	7.871.300.000,00
9	Pariwisata	0,00	0,00	0,00
10	Lingkungan Hidup	0,00	0,00	2.670.000.000,00
11	Pasar	2.780.000.000,00	4.686.588.000,00	0,00
12	Jalan	17.240.836.000,00	14.017.967.000,00	14.802.492.000,00
13	Irigasi	4.041.000.000,00	4.650.561.000,00	2.518.016.000,00
JUMLAH		83.594.308.000,00	172.353.648.000,00	91.059.184.000,00

Sumber: Data peneliti.

Berdasarkan tabel data perbedaan mengenai realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018-2020 yang diambil berdasarkan data Pagu DAK, dapat diketahui bahwa secara garis besar terjadi peningkatan pada tahun 2019 dan di tahun 2020 mengalami penurunan terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dipaparkan diatas bahwa di tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan transfer daerah difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan beberapa bidang yang lain mengalami penyederhanaan realisasi dana DAK guna untuk memfokuskan pada penanganan COVID-19 di bidang kesehatan.

Untuk bidang-bidang lain selain bidang kesehatan yang di prioritaskan dalam masa pandemi ini agar dapat meningkatkan pertumbuhan daerah tetap dijalankan, sesuai dengan penuturan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub

Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

Infrastruktur sebenarnya kalau tidak COVID-19, 2020 ini berfokus pada pembangunan wilayah Pamekasan, jadi jalan antara wilayah tengah ke utara, antara Pegantenan ke Batu Marmar, air minum juga berfokus pada pengendalian pengentasan stunting, sanitasi juga begitu, pembangunan pembiayaan melalui DAK itu fokus pada pembiayaan prioritas pendidikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Waru dan RSUD Slamet Martodirdjo, pelayanan dasar peningkatan kualitas puskesmas, ketersediaan obat, perpustakaan, KB, peningkatan kualitas jaringan irigasi, perikanan kita fokus pada persediaan sarpras (alat tangkap). DAK Pamekasan tidak begitu besar sekitar 80-90 Miliar, semua fokus pada pembiayaan untuk prioritas pembangunan daerah, jalan berfokus pada jalan yang strategis. Bidang pendidikan mendapat dana DAK paling besar karena di Undang-Undang alokasi dana APBD kan 20%, setiap tahun dana DAK pendidikan itu paling besar sekitar 20-30 Miliar. Urutannya memang seperti itu, pendidikan, kesehatan, baru infrastruktur.⁷

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan. Menuturkan bahwa, apabila tidak terjadi pandemi COVID-19 yang sedang melanda di penjuru dunia ini khususnya di Kabupaten Pamekasan, pada bidang infrastruktur berfokus pada pembangunan wilayah Pamekasan. Bidang jalan bagian wilayah tengah-utara, dari Pegantenan-Batu Marmar. Bidang air minum berfokus pada pengendalian pengentasan stunting, dan juga sanitasi. Pada pembangunan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berfokus pada pembiayaan yang termasuk prioritas, seperti pendidikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Waru dan RSUD Slamet Martodirdjo, pelayanan dasar peningkatan kualitas puskesmas, ketersediaan obat, perpustakaan, KB,

⁷ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

peningkatan kualitas jaringan irigasi, jalan yang berfokus pada jalan yang strategis, dan juga perikanan yang berfokus pada persediaan sarana dan prasarana (sarpras) seperti alat tangkap. Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan ini tidak begitu besar kurang lebih sekitar 80-90 Miliar. Pada semua fokus pembiayaan digunakan untuk prioritas pembangunan daerah. Dalam bidang pendidikan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling besar di setiap tahunnya yaitu 20% berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih sekitar 20-30 Miliar. Urutan prioritas pengalokasian Dana Alokasi Khusus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kemudian untuk Dana Alokasi Khusus tahun 2020 dialihkan dalam penanganan COVID-19 seperti pemaparan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator: “Untuk 2020 DAK kan dialihkan untuk penanganan COVID-19 kecuali bidang pendidikan dan kesehatan plus kegiatan/ bidang yang sudah tandatangan kontrak atau yang sudah mau dilaksanakan tetap dilanjutkan. Kalau di bidang pendidikan itu seperti rehab, bangun perpustakaan sekolah, bangun pengadaan buku. Kita dikasih batas waktu akhir September harus sudah tandatangan kontrak karena DAK ini ketat, ketika kita dapat alokasi maka pusat itu menentukan time flimnya artinya batasan-batasan waktu kapan kita kerjakan kalo engga yah angus, misalkan DAK irigasi kita itu ditarget di triwulan pertama bulan sekian tanggal sekian sudah tandatangan kontrak kalo tidak yah angus”.⁸

“Alokasi DAK kan sekitar 100 Miliar untuk semua bidang, itu sangat membantu kita untuk membiayai sektor-sektor pembangunan yang harus kita bangun sebagai prioritas kabupaten. Yang paling besar memang di Disdik, di Pendidikan hampir semua sekolah-sekolah itu didanai oleh DAK. Prioritas kita itu ada 4, ada TK/PAUD, SD, SMP, sama perpustakaan. Di perpustakaan itu kemarin tahun 2019 kita baru mendanai pengadaan bukunya itu dari DAK, rehab di bagian depan itu juga dari DAK”.⁹

⁸ Wowok Prabowo, Staf Operator, *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

⁹ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).



Sumber: Dokumentasi Peneliti Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator menuturkan bahwa, Dana Alokasi Khusus (DAK) di tahun 2020 dialihkan untuk penanganan COVID-19 kecuali di bidang pendidikan dan bidang kesehatan, juga dalam bidang maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dan sudah menjalani tandatangan kontrak akan tetap dilanjutkan. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

dalam bidang pendidikan, yaitu seperti renovasi, bangun perpustakaan sekolah, dan pengadaan buku. Batas waktu yang diberikan oleh pusat sampai dengan akhir bulan September harus sudah menjalani tandatangan kontrak, apabila lebih dari batas waktu yang diberikan maka Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut akan hangus.

Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa, di tahun 2020 seharusnya dibangun infrstruktur untuk pembangunan wilayah Pamekasan bagian tengah-utara (Pegantenan-Batu Marmar). Akan tetapi, hal itu ditangguhkan terlebih dahulu akibat adanya pandemi ini, dikarenakan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) saat ini sedang di prioritaskan pada bidang kesehatan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun tersebut, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk penanganan COVID-19 kecuali di bidang pendidikan, bidang kesehatan, juga dalam bidang maupun kegiatan yang akan dilaksanakan dan sudah menjalani tandatangan kontrak akan tetap dilanjutkan. Dalam bidang pendidikan mendapat alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling besar di setiap tahunnya yaitu 20% berdasarkan UUD 1945 pasal 31 ayat 4 dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kurang lebih sekitar 20-30 Miliar. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pendidikan, yaitu seperti renovasi, bangun perpustakaan sekloah, dan pengadaan buku. Pembangunan di Kabupaten Pamekasan yang di danai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dijelaskan bahwa berdasarkan prioritas kebutuhan yang ada, seperti infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Waru dan RSUD Slamet Martodirdjo, pelayanan dasar peningkatan kualitas puskesmas, ketersediaan obat, perpustakaan, Keluarga Berencana (KB), peningkatan kualitas jaringan irigasi, jalan yang berfokus pada

jalan yang strategis, dan juga perikanan yang berfokus pada persediaan sarana dan prasarana (sarpras) seperti alat tangkap. Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan sekitar 80-90 Miliar dan digunakan untuk pembiayaan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan. Urutan prioritas pengalokasian Dana Alokasi Khusus dimulai dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dialokasikan dalam berbagai bidang, seperti penuturan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

“Dana DAK itu di alokasikan ke berbagai bidang, banyak bidang yang didanai oleh dana DAK mbak, jadi semua bidang bisa masuk ke dana DAK tergantung prioritasnya seperti apa, kita hanya bisa mengajukan lewat aplikasi Krisna dan menunya sudah ditentukan oleh pusat”.¹⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menyebutkan jika, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ke berbagai bidang, beberapa bidang dapat di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan prioritas kebutuhannya dan pengajuannya melewati aplikasi Krisna dengan menu pembagiang bidang-bidang yang sudah ditentukan.

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dialokasikan dalam beberapa bidang, seperti bidang

¹⁰ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang prasarana pemerintahan daerah, bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, bidang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Semua bidang tersebut dapat di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan prioritas yang dibutuhkan, bidang mana yang masuk dalam prioritas, dan diajukan melalui aplikasi Krisna dengan bidang-bidang yang sudah ada dalam menu aplikasi tersebut.

Dalam bidang Perumahan dan Permukiman, menurut penuturan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan.

Untuk bantuan pada program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2020 itu mendapat kucuran dana yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK). Di Pamekasan ini hampir 9.000 lebih rumah tidak layak huni. Yang terfasilitasi dari DAK ini ada mungkin sekitar 113 rumah. Jadi nanti penyalurannya itu langsung berupa barang, masyarakat tidak langsung pegang uang.¹¹



Sumber: Data dokumentasi Program RTLH Tahun 2020.

Dalam bidang infrastruktur bangun jalan di suatu ruas jalan tertentu yang di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kerusakan, cara mengatasinya

¹¹ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

dengan beberapa proses, seperti penuturan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator.

Ditangani oleh dana APBD, namanya pemeliharaan rutin. Jadi, kita kalau jalan ada peningkatan, pemeliharaan berkala, dan ada pemeliharaan rutin. Jadi kalau ada jalan bolong-bolong itu termasuk pemeliharaan rutin. Tapi memang yang didanai dana DAK itu jalan Kabupaten dan strategis. Kalau jalan-jalan poros desa dan sebagainya yang bukan kewenangan desa itu didanai oleh APBD atau dana lain. Tahapan DAK itu cukup lama sekitar 6 bulan dan tidak bisa dirubah.¹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator menuturkan bahwa, apabila ada jalan yang rusak ditangani oleh dana APBD, yang dinamakan pemeliharaan rutin. Dalam bidang jalan terdapat peningkatan, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin. Jadi apabila ada jalan yang rusak dan bolong itu termasuk dalam pemeliharaan rutin. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya mendanai jalan Kabupaten dan jalan strategis. Sedangkan jalan-jalan poros desa dan sebagainya yang bukan wewenang desa didanai oleh APBD ataupun dana yang lainnya. Tahapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut memakan waktu yang cukup lama sekitar 6 bulan dan sudah tidak dapat dirubah.

Kesimpulannya adalah dalam bidang infrastruktur jalan terdapat peningkatan, pemeliharaan berkala, dan juga pemeliharaan rutin. Apabila di salah satu jalan yang sudah di danai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kerusakan, maka perbaikan tersebut di danai oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinamakan pemeliharaan rutin. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang infrastruktur jalan mempunyai syarat, yaitu jalan tersebut merupakan jalan Kabupaten dan jalan yang strategis.

¹² Wowok Prabowo, Staf Operator, *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Pada wawancara dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan, juga membahas tentang bagaimana tahap pengusulan dalam bidang kesehatan.

Ada menunya di aplikasi Krisna, kesehatan itu dibagi menjadi kesehatan rujukan (rumah sakit), pelayanan desa (puskesmas, pengadaan obat, pembangunan puskesmas, pengadaan ambulance, alat kesehatan), dan KB. Jadi banyak menunya, kalau rumah sakit itu hanya alat kesehatan aja (alat cuci darah). Dana DAK dibagi menjadi 2 karena sehubungan RSUD Waru sudah beroperasi jadi dana usulannya dibagi 2, itu pun juga harus disyaratkan, syaratnya harus ada dokter ahli dibidangnya baru melakukan usulan alat kesehatannya.¹³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan menuturkan bahwa, untuk pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang kesehatan tersebut sudah terdapat menu di aplikasi Krisna. Dalam bidang kesehatan dibagi menjadi kesehatan rujukan seperti rumah sakit; pelayanan desa, seperti puskesmas, pengadaan obat, pembangunan puskesmas, pengadaan ambulance, dan alat kesehatan; dan KB. Dalam rumah sakit hanya mengusulkan alat kesehatan saja, seperti alat cuci darah dan yang lainnya. Dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) pengalokasiannya dibagi menjadi 2 sehubungan dengan RSUD Waru yang sudah mulai beroperasi. Adapun syarat agar usulan dapat disetujui adalah dengan adanya dokter yang ahli dibidangnya, setelah itu bisa melakukan usulan sesuai kebutuhan yang ada.

¹³ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Dari hasil data diatas bahwa, pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang kesehatan dapat dilakukan pada aplikasi Krisna. Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan dalam bidang kesehatan ini pengalokasian dana usulannya dibagi menjadi 2, yaitu RSUD Slamet Martodirdjo dan RSUD Waru. Dalam rumah sakit dapat mengusulkan alat kesehatan, seperti alat cuci darah. Adapun syarat agar usulan dapat disetujui adalah dengan adanya dokter yang ahli dibidangnya, lalu setelah itu bisa melakukan usulan sesuai kebutuhan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti mengenai penerapan kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan, melihat data yang diperoleh dan ditemukan oleh peneliti sudah ada bukti bahwa hasil dari kesepakatan rapat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2022 mendatang itu sudah menyetujui adanya program maupun kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini. Hal ini tentunya sejalan dengan proses perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersifat T-1, yaitu pelaksanaan DAK untuk tahun yang akan datang sudah direncanakan di tahun sebelumnya. Seperti yang sudah peneliti lihat, kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang pendidikan sudah direncanakan atau diusulkan di tahun sebelumnya untuk pembangunan rehab gedung perpustakaan umum di Jl. Jokotole Pamekasan dan pengadaan bukunya. Pelaksanaan pembangunan tersebut baru dimulai pada tahun 2019 dengan anggaran yang mencapai 1 Miliar, memang dialokasikan untuk perbaikan pada bagian depan yang digunakan sebagai fasilitas pengunjung perpustakaan umum tersebut yang

digunakan sebagai lahan parkir pengendara sepeda motor. Dan juga buku-buku yang semakin banyak dan lengkap yang dapat peneliti lihat untuk menunjang peningkatan minat membaca bagi masyarakat Kabupaten Pamekasan.

3. Dampak Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendanai kebutuhan bidang/ kegiatan tertentu yang ada di Kabupaten Pamekasan ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini nantinya akan membantu masyarakat mewujudkan suatu Kabupaten yang maju, berdaya, mandiri, berkeadilan, aman, dan sejahtera sesuai dengan visi Kabupaten Pamekasan. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan, mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan menuturkan:

“Kalau ditanya soal perkembangan dari segi pembangunannya sudah bisa dikatakan baik, karena saat ini kita sudah banyak kemajuan, contohnya ya bidang infrastruktur di perpustakaan umum itu menggunakan dana DAK, di rumah sakit Slamet Martodirdjo juga fasilitasnya sudah digunakan dengan baik, dan masih banyak lagi itu yg pakai dana DAK. Cuma ya memang anggaran dana nya di tahun 2020 kan dialihkan ke COVID-19, jadi dari sisi dananya jadi gak turun penuh begitu”.¹⁴

¹⁴ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan, mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan, dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan pembangunan di bidang infrastruktur sudah dapat dikatakan baik dan mengalami peningkatan dari segi kualitasnya, walaupun pada tahun anggaran 2020 terdapat beberapa dana yang dialihkan untuk penanganan COVID-19.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator yang menuturkan bahwa: “Untuk meningkatkan pembangunan daerah kan ada beberapa indikator ya, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi. Tapi kalau dilihat dari ketiga itu Pamekasan ini sudah dikatakan jauh lebih baik dari sebelumnya, banyak perkembangan yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan, cuman memang tingkat kemiskinan di Pamekasan paling rendah di Madura, masih tetap seperti itu dan susah kalau bicara soal kemiskinan, tapi kalau pertumbuhan ekonomi Pamekasan paling bagus, dari beberapa indikator itu Pamekasan bisa dikatakan lebih bagus”.¹⁵

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wowok Prabowo selaku staf operator dapat diambil kesimpulan jika dalam peningkatan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dapat dilihat dari 3 indikator utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari ke-3nya sudah dapat dikatakan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dikarenakan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini memiliki indikator-indikator, maka bukti dari kesuksesan pembangunan daerah tersebut yaitu jika target capaian indikatornya dapat terrealisasi. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di daerah harus melihat target capaian indikator pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan

¹⁵ Wowok Prabowo, Staf Operator, *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

daerah tersebut mengenai indikator kinerja pembangunan itu. Hanya saja tingkat kemiskinan di Kabupaten Pamekasan masih terbilang rendah.

Dampak terhadap masyarakat Pamekasan mengenai kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini tentunya dapat dirasakan dalam beberapa bidang. Yang pertama, peneliti melakukan wawancara terkait bagaimana dampak yang dirasakan masyarakat dalam kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Pamekasan dalam bidang Air Minum yang dilakukan dengan Bapak Juma'i yang berprofesi sebagai pensiunan TNI mengatakan:

“Kalau dampak yang saya dan masyarakat sekitar rasakan mungkin saya akan mengatakan kalau sudah ada peningkatan, kemaren saya lihat ada pembangunan pengolahan air atau apa itu saya tidak tahu namanya di Desa Samiran, itu kan salah satu kemajuan yang dirasa bisa meningkatkan kesenjangan masyarakat Pamekasan, dan itu bisa dirasakan oleh hampir semua masyarakat yang mengalami kekeringan dan membutuhkan air bersih”.¹⁶

Kemudian peneliti menanyakan lebih lanjut kepada Bapak Slamet Trahayo yang berprofesi sebagai pegawai swasta yang mengatakan:

“Untuk pemenuhan air bersih dan masalah kekeringan di Pamekasan ini saya rasa sudah mengalami peningkatan ya, tapi untuk jelas dan lebih detailnya bagaimana dan seperti apa saya tidak tahu, hanya saja yang saya ketahui ada pengeboran di Desa Bhujur. Itu sangat membantu ya untuk masyarakat sekitar”.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Juma'i dan Bapak Slamet dapat ditarik kesimpulan bahwasannya kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang air minum ini sudah dikatakan mengalami kemajuan. Dimana dari penuturan tersebut dapat diperkuat oleh penuturan dari Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala

¹⁶ Juma'i, Pensiunan TNI, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

¹⁷ Slamet Trahayo, Pegawai Swasta, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan yang mengatakan:

“Capaian kegiatan fisik di bidang air minum di tahun 2020 ini menggunakan dana DAK 2019 terdapat program pelaksanaan pembacaan meteran air dengan sistem android, sebelumnya menggunakan sistem yang masih manual, dan itu kan dirasa masih kurang efektif. Dan pembangunan WTP (Water Treatment Plant) atau bisa disebut instalasi pengolahan air di Desa Samiran, Kecamatan Proppo dengan kapasitas kurang lebih 50 liter. Program lainnya ada pembangunan 1 unit sumur produksi dan jaringan pipa itu dilaksanakan di Desa Terrak, Kecamatan Tlanakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga dan upaya agar terlepas dari kekeringan”.¹⁸

Hal ini dapat dilihat dengan data realisasi maupun anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 4.5

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Pamekasan
Bidang Air Minum

No		Pagu Anggaran	
		2019	2020
1.	Perencanaan	2.442.182.100	951.000.000
2.	Realisasi	2.442.182.100	941.713.000

Sumber data diolah: Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum Tahun Anggaran 2019-2020.

Dapat disimpulkan bahwa kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan di bidang air minum sudah direalisasikan dengan benar dan tepat sasaran. Dilihat dari meningkatnya dari segi

¹⁸ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (8 Juni 2021).

kualitas fasilitas yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat Pamekasan. Namun, dari segi anggaran dan realisasi Dana DAK yang mengalami penurunan dari tahun 2019-2020.

Yang kedua, dampak yang dirasakan masyarakat dalam kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Pamekasan dalam bidang pendidikan yang dilakukan dengan Ibu Eny Sunarto selaku masyarakat yang berprofesi sebagai Guru SD, mengatakan:

“Bagi saya selaku Guru SD dampak yang dirasakan lebih kepada fasilitas di setiap sekolah sudah mulai berkembang, banyak sekolah yang sudah di renovasi dan masih ada juga sekolah di desa-desa terpencil yang belum dilirik bagaimana fasilitasnya, kalau di kota-kota sudah bagus ya, fasilitas yang ada sudah bagus banget dari mulai guru-gurunya, bangunannya, perpus sekolahnya juga sudah bagus-bagus ya di sekolah-sekolah sekarang, cuman sekarang kan terkendala dengan pandemi ini, jadi siswa itu belajarnya ya kurang maksimal tidak seperti sebelum ada pandemi, itu saja sih dampak yang saya rasakan, kalau seperti pengadaan buku, dan lain sebagainya sudah cukup bagus ya untuk meningkatkan pembangunan daerah di Pamekasan ini, dengan banyaknya sekolah-sekolah di Pamekasan yang berkualitas, fasilitasnya bagus, sudah banyak sekolah yang maju dan ternama kan bisa meningkatkan pembangunan di Pamekasan ”.¹⁹

Kemudian peneliti juga mewawancari Sherly Maulina selaku Masyarakat Pamekasan yang sedang menempuh pendidikan perkuliahan dan juga berprofesi sebagai pegawai swasta yang mengatakan:

“Kalau dari segi pendidikan sih yang saya rasakan mungkin lebih kepada fasilitas yang sedang saya sangat rasakan, karena saya saat ini sedang dalam tahap semester akhir dan lagi mengerjakan skripsi, jadi saat ini saya sangat merasakan peningkatan di Perpustakaan Umum yang buku-bukunya lebih lengkap dan juga dilihat dari sekolah-sekolah di Pamekasan sekarang kan udah mulai maju, kualitasnya juga gak kalah sama kabupaten-kabupaten lain”.²⁰

¹⁹ Eny Sunarto, Guru SD, *Wawancara langsung* (20 Mei 2021).

²⁰ Sherly Maulina, Mahasiswi & Pegawai Swasta, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Eny Sunarto dan Sherly Maulina dapat ditarik kesimpulan mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini sudah mengalami kemajuan. Dimana dari penuturan tersebut dapat diperkuat oleh penuturan dari Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan yang mengatakan:

“Pelaksanaan DAK di bidang pendidikan ini untuk tahun 2019 itu ada pembangunan ruang kelas baru di 6 sekolah, pembangunan jamban di 26 sekolah, dan masih banyak lagi, seperti pengadaan buku, rehab ruang kelas, dan rehab perpustakaan, contoh di perpustakaan umum itu rehab bagian depan dan pengadaan bukunya itu dari dana DAK. Kalau di tahun 2020 ini seperti proyek rehabilitasi gedung di SMP Negeri 8 Pamekasan di Jalmak itu, termasuk rehab ruang guru, rehab perpustakaannya, sama pembangunan jamban.”²¹

Berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti mengenai Realisasi dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan, seperti berikut:

Tabel 4.6
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Pamekasan
Bidang Pendidikan

No		Pagu Anggaran		
		Diknas SD		
		2018	2019	2020
1.	Perencanaan	11.280.284.000	24.209.407.000 (Mekanisme belanja)	5.220.000.000

²¹ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (8 Juni 2021).

2.	Realisasi	3.498.448.200	24.199.524.485	5.030.885.200
----	-----------	---------------	----------------	---------------

No		Pagu Anggaran		
		Diknas SMP		
		2018	2019	2020
1.	Perencanaan	11.600.000.000	18.242.750.000	15.788.318.000
2.	Realisasi	10.737.150.000	17.998.136.000	15.745.179.000
	(Pelaksanaan)			

Sumber data diolah: Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2018-2020.

Dapat diketahui bahwa dalam data tersebut diatas pada tahun 2018-2019 realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan, pada tahun 2019 anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai kurang lebih sekitar 29 Miliar yang direalisasikan untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pengadaan buku, rehab ruang kelas, rehab perpustakaan sekolah. Peningkatan sarana dan prasarana infratraktur sekolah ini bertujuan untuk menunjang terhadap keberlangsungan proses pembelajaran, agar menciptakan sekolah yang berkualitas. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan diakibatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penyederhanaan karena pandemi COVID-19 ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan di bidang pendidikan pada tahun 2018-2019 sudah direalisasikan dengan benar dan tepat sasaran. Dilihat dari meningkatnya dari segi kualitas fasilitas yang berdampak positif kepada masyarakat Pamekasan dan juga dari segi anggaran dan realisasi Dana DAK yang meningkat

dari tahun 2018-2020. Namun, pada tahun 2019-2020 dalam segi anggaran mengalami penurunan diakibatkan penyederhanaan dana yang dialihkan untuk penanganan pandemic COVID-19.

Yang ketiga, dampak yang dirasakan masyarakat dalam kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Pamekasan dalam bidang kesehatan yang dilakukan dengan Ibu Ayuningtyas selaku masyarakat yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan, mengatakan:

“Yang paling menonjol untuk sekarang kan di kesehatan ya, karena kan juga lagi marak-maraknya pandemi yang gak selesai-selesai ini, rumah sakit di Pamekasan RSUD Slamet Martodirdjo untuk sekarang saya lihat karena saya baru saja melahirkan, sistem pelayanannya masih kurang ya, suster-suster perawatnya masih kurang cekatan dan lama buat nanganin pasien, kalau ada pasien baru itu tidak langsung ditangani masih bertele-tele, alat kesehatannya juga terbilang masih kurang ya karena ada salah satu pasien yang anaknya itu tersedak air ketuban tapi harus dilarikan ke rumah sakit di Surabaya disini alatnya masih kurang memadai katanya masih harus gentian dengan bayi-bayi yang lain yang juga mengalami hal yang sama, ya bagaimana Pamekasan bisa maju kalau pasien dari sini dirujuk ke luar kota”.²²

“Menurut saya dalam hal fasilitas sudah oke, tapi dalam segi pelayanan yang masih kurang optimal, pernah keluarga saya minta rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit di luar kota karena dokter dan perawatnya itu kurang menangani pasien”.²³

Kemudian peneliti juga mewawancarai Noviana Ika yang berprofesi sebagai perawat di RSUD Slamet Martodirdjo mengatakan:

“Untuk dampak yang saya rasakan sendiri ini dalam sarana prasarana kesehatan, seperti alat kesehatan, alat pelindung diri (APD) yang saat ini sangat dibutuhkan masih tersedia tetapi tidak banyak. Dan juga kan di RSUD Slamet Martodirdjo ini ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk

²² Ayuningtyas, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara langsung* (20 Mei 2021).

²³ Sulalah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara langsung* (20 Mei 2021).

penanganan COVID-19 karena kan tenaga medisnya dinilai kompeten, sarana prasarana juga mendukung, mulai dari ruang isolasi dan peralatan medis lainnya. Di RSUD Slamet Martodirdjo juga menyediakan 2 ruangan isolasi, jadi menurut saya itu sudah berjalan dengan baik”.²⁴

Dampak di bidang kesehatan ini juga dapat diperkuat dari data yang dimiliki oleh peneliti, yaitu:

Tabel 4.7

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Pamekasan
Bidang Kesehatan

No		Pagu Anggaran		
		2018	2019	2020
1.	Perencanaan	11.724.651.000	34.529.727.000	8.604.297.050
2.	Realisasi	3.411.648.279	22.184.606.000	8.044.431.365

Sumber data diolah: Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018-2020.

Diketahui bahwa pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari segi anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK), juga di tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang diakibatkan dari pandemi COVID-19. Namun dalam segi kualitas di RSUD Slamet Martodirdjo yang dirasa sudah mendukung untuk kesejahteraan masyarakat dalam penanganan COVID-19. Akan tetapi, dampak yang dirasakan masyarakat mengenai kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan di bidang kesehatan ini juga dirasa masih kurang optimal dan tidak direalisasikan dengan tepat. Karena masih terkendala dengan alat kesehatan yang kurang memadai dan pelayanan rumah sakit yang dirasa masih kurang baik.

²⁴ Noviana Ika, Perawat RSUD Slamet Martodirdjo, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

Yang keempat, dalam bidang infrastruktur jalan dampak yang dirasakan masyarakat dalam kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Pamekasan yang dilakukan dengan Bapak Sofyan yang berprofesi sebagai petani mengatakan:

“Sampai saat ini menurut saya masih banyak jalan-jalan yang rusak ya, contohnya ya dirumah istri saya di Desa Gugul Tlanakan, sudah lama rusak tapi sampai saat ini masih belum diperbaiki. Apalagi yang paling parahnya saat turun hujan, banyak genangan air yang cukup dalam. Beberapa kali saya melihat orang mungkin dari pemerintah melakukan pengukuran di jalan rusak tersebut, tapi masih belum juga ada perbaikan”.²⁵

Wawancara juga dilanjutkan kepada Bapak Ainul Yaqin yang berprofesi sebagai wirausaha mengatakan:

“Saya merasa jalan-jalan penghubung antar kecamatan, antar desa di beberapa titik itu mengalami kerusakan, seperti di Desa Trasakan Larangan. Warga sekitar itu sampai memasang penanda kayu agar pengendara yang lewat itu tidak terperosok atau terjadi kecelakaan. Itu perlu adanya tindakan dari pemerintah ya, karena takutnya kalau dibiarkan malah tambah rusak, karena kan kalau hujan atau sebagainya yang terjadi hanya dapat menambah tingkat kecelakaan di jalan itu”.²⁶

Menurut penuturan dari Bapak Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) ini mengatakan:

“Infrastruktur dalam bidang jalan kalau tidak COVID-19, di tahun 2020 ini berfokus pada perbaikan dan pembangunan ruas jalan antara wilayah tengah ke utara, yaitu dari Pegantenan ke Batumarmar”.²⁷

²⁵ Sofyan, Petani, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

²⁶ Ainul Yaqin, Wirausaha, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

²⁷ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (29 Maret 2021).

Berdasarkan hasil wawancara mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang infrastruktur jalan berbanding lurus dengan data yang dimiliki oleh peneliti, yaitu:

Tabel 4.8

**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Pamekasan
Bidang Infrastruktur Jalan**

No		Pagu Anggaran		
		2018	2019	2020
1.	Perencanaan	16.911.711.000	10.619.175.000	2.561.046.000
2.	Realisasi	16.911.711.000	9.515.785.000	2.560.498.000

Sumber data diolah: Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang PUPR Tahun Anggaran 2018-2020.

Pada data tersebut diatas anggaran dana dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang infrastruktur jalan dari tahun 2018-2020 mengalami penurunan. Juga dari segi kualitas yang masih banyak terdapat jalan-jalan rusak. Hal ini terjadi akibat adanya refocusing anggaran. Refocusing anggaran ini adalah kegiatan pemerintah yang semula digunakan untuk membangun kegiatan/ program pemerintah dipotong untuk penanganan COVID-19.

Dampak dari adanya refocusing anggaran ini adalah belanja daerah Pamekasan yang semula dianggarkan Rp 2,1 triliun pada APBD 2021 dipastikan ada perubahan dan pergeseran. Pekerjaan pembangunan pada dinas PUPR dipotong sebesar 50% untuk penanganan pandemi COVID-19. Proyek pembangunan di Kabupaten Pamekasan ini akan berpotensi tidak dapat maksimal.

Dapat disimpulkan, dampak yang dirasakan masyarakat Pamekasan dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang infrastruktur jalan masih belum dikatakan dapat meningkatkan pembangunan daerah, dampak yang dirasakan masyarakat masih dirasa kurang baik dan pengalokasian dana DAK masih belum efektif.

Yang kelima, dampak yang dirasakan masyarakat dalam kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Pamekasan dalam bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan dengan Chandra Henrik yang berprofesi sebagai pegawai BUMN mengatakan:

“Mungkin bagi saya secara fisik tidak mendapatkan dampaknya, tapi bagi sebagian masyarakat yang rumahnya tidak layak huni ini sangat berdampak positif bagi kesejahteraan sosialnya, dari segi fisik rumah, seperti atap, lantai, dinding yang mungkin kondisinya kurang baik untuk rumah layak huni. Masih banyak kan rumah-rumah warga di pedesaan yang masih tidak layak huni, bangunannya hampir roboh, kumuh, dan lain sebagainya.”²⁸

Kemudian peneliti juga mewawancarai mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang perumahan dan permukiman ini dengan Ibu Subaidah yang berprofesi sebagai pedagang mengatakan:

“Masih banyak warga yang kurang mampu tidak dapat jatah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini. Dengan kondisi rumah yang hampir roboh dan memprihatinkan. Kadang kalau hujan atap bocor semua, lantai yang dari tanah itu jadi banjir dan penuh sama genangan air dan jadi seperti lumpur. Mungkin kurangnya informasi dan belum di data sama pihak desa dan belum diajukan untuk renovasi RTLH ini”.²⁹

Peneliti juga mewawancarai lebih lanjut kepada masyarakat Pamekasan mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan

²⁸ Chandra Henrik, Pegawai BUMN, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

²⁹ Subaidah, Pedagang, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang perumahan dan permukiman ini dengan Bapak Wawan yang berprofesi sebagai Guru Honorer mengatakan:

“Di tahun 2020 ini yang saya tahu ya dan saya juga dengar dari warga kalau terdapat rumah warga yang tidak layak huni mendapat bantuan untuk di renovasi yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini kan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apabila rumahnya layak huni maka psikis keluarganya itu kan akan merasa aman, nyaman, tenang kalau menempati rumah yang layak huni.”³⁰

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Bapak Bapak Andri Isfaraini selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Pamekasan yang mengatakan:

“Program RTLH untuk di Pamekasan ini ada sebanyak 130 penerima yang didanai dari DAK tahun 2020 yang diperuntukkan di wilayah Kecamatan Pamekasan saja. Karena kan memang DAK ini dari pemerintah pusat yang digunakan untuk mendukung program/ kegiatan prioritas nasional yang ada di daerah. Efek dari program itu sangat bagus bagi masyarakat. Jumlah RTLH yang perlu ditangani ini paling banyak di kecamatan kota Pamekasan, Pademawu, Tlanakan, Palengaan, Pegantenan, Batumarmar, dan Kadur. Di tahun 2018 perbaikan RTLH itu ada kurang lebih 175 unit, tahun 2019 kurang lebih 578 unit.”³¹

Berdasarkan data yang dimiliki oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.9

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kabupaten Pamekasan
Bidang Perumahan dan Permukiman

No	Pagu Anggaran		
	2018	2019	2020

³⁰ Wawan, Guru Honorer, *Wawancara langsung* (7 Juni 2021).

³¹ Andri Isfaraini, Kepala Sub Bidang Permukiman dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menangani Dana Alokasi Khusus (DAK), *Wawancara langsung* (8 Juni 2021).

1.	Perencanaan	2.325.000.000	3.062.500.000	2.275.000.000
2.	Realisasi	2.325.000.000	3.062.500.000	2.275.000.000

Sumber data diolah: Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2018-2020.

Dari data diatas mengenai anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam bidang perumahan dan permukiman pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan hingga 32%. Sedangkan di tahun 2019-2020 mengalami penurunan hingga 25%. Angka perbaikan program/ kegiatan ini menurunkan jumlah penerima RTLH yang ada di Kabupaten Pamekasan. Perbaikan RTLH 2 tahun terakhir ini mengindikasikan komitmen pemerintah terhadap masyarakat. Beberapa masyarakat masih belum merasakan dampak yang positif dari adanya program ini, masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pamekasan yang belum tersentuh oleh pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak yang dirasakan masyarakat Pamekasan dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang perumahan dan permukiman melalui program perbaikan RTLH dirasa belum maksimal. Sebab penyaluran program RTLH yang dianggap tidak tepat sasaran pada masyarakat yang membutuhkan dan kurang mampu masih belum mendapat pendataan untuk penerima perbaikan RTLH ini dari pemerintah.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan ini yang sudah dipaparkan dalam beberapa bidang dan indikator yang dinilai dapat melihat peningkatan atau penurunan yang terjadi dalam suatu

pembangunan di daerah dan dalam memenuhi kesejahteraan masyarakat memiliki dampak yang secara signifikan sudah dirasa baik dan tepat sasaran. Namun, ada juga yang beranggapan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) ini tidak disalurkan dengan baik dan belum optimal. Secara garis besar pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan sudah mengalami peningkatan dengan capaian-capaian yang sudah ada berdasarkan dengan bukti paparan data-data diatas meskipun tidak dapat dipungkiri jika ada beberapa masyarakat yang masih belum merasa adanya peningkatan dari segi kualitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini memang menimbulkan banyak dampak yang bisa dirasakan, mulai dari dampak yang sangat positif dan juga dampak yang dirasa masih kurang baik dalam penerapan dana DAK ini. Dampak yang dirasakan dalam berbagai bidang sesuai dengan penuturan para informan masyarakat yang diwawancarai, peneliti melihat dalam bidang yang pertama yaitu air minum, memang betul masalah kekeringan dan air bersih ini masih menjadi permasalahan yang harus ditangani untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Seperti yang peneliti lihat adanya penurunan dalam segi anggaran di 2 tahun terakhir ini yang mencapai hingga 61%, namun dari segi kualitas memang mengalami peningkatan yang terdapat di Desa Samiran.

Yang kedua, dalam bidang pendidikan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menurut penuturan dari Ibu Eny memang masih banyak sekolah-

sekolah yang masih kurang memenuhi dari segi fasilitasnya, seperti bangunan kelas yang kurang layak untuk kegiatan belajar mengajar. Dalam proyek rehabilitasi gedung di SMP Negeri 8 Pamekasan menurut peneliti pembangunan rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, perpustakaan dan pembangunan jamban tersebut dapat meningkatkan sarana dan prasarana demi terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam proses belajar mengajar bagi siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Menurut penuturan dari Sherly, bahwasannya dampak positif yang dirasakan dalam fasilitas di perpustakaan umum memang mengalami peningkatan seperti yang peneliti lihat dalam hal pembangunan dan fasilitas untuk pengunjung perpustakaan umum tersebut. Dengan anggaran yang hampir mencapai 1 Miliar ini adanya peningkatan di bagian depan yang dijadikan sebagai lahan parkir untuk pengunjung dan pengadaan buku-buku di perpustakaan umum tersebut yang semakin banyak dan lengkap untuk meningkatkan minat membaca bagi masyarakat Pamekasan. Sejauh ini dampak yang dirasakan masih dibidang positif untuk kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan.

Yang ketiga, dalam bidang kesehatan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti terdapat perbedaan dari penuturan yang disampaikan oleh Ibu Ayuningtyas, Sulalah dan Noviana Ika. Jika menurut Ibu Ayu dan Sulalah memang dalam hal pelayanan rumah sakit yang kurang optimal dan alat kesehatan yang kurang memadai dengan seringnya pasien dirujuk ke rumah sakit di luar kota dengan berbagai macam permasalahan, seperti penanganan yang kurang profesional, alat kesehatan yang masih menunggu giliran dan bergantian dengan pasien yang lain. Berbeda dengan penuturan Noviana dimana alat kesehatan seperti

APD yang masih terus dibutuhkan karena APD tersebut hanya dipakai 1 kali dan tidak bisa dipakai lagi, maka dari itu rumah sakit terus membutuhkan suplai pengadaan alat APD.

Yang keempat, dalam bidang infrastruktur jalan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti memang betul dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sofyan dan Bapak Ainul yang mengatakan masih banyaknya ruas-ruas jalan yang rusak dan belum dilakukan perbaikan. Peneliti melihat untuk infrastruktur jalan ini masih di tahap pengusulan dimana di setiap desa melakukan koordinasi yang berada di wilayah setempat agar pemerintah dapat memperoleh data riil terkait kondisi infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan tersebut.

Dan yang terakhir, yaitu dalam bidang perumahan dan permukiman berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwasannya memang masih banyaknya masyarakat sekitar yang kurang mampu dan benar-benar tinggal dalam rumah yang tidak layak ini belum memperoleh bantuan dari proyek RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni ini. Terutama peneliti melihat di kawasan-kawasan Pademawu dimana masih banyaknya warga yang tinggal dalam kondisi rumah yang terbuat dari anyaman bambu, triplek, dan atap yang sudah banyak bocor belum terdaftar dari penerima bantuan proyek RTLH tersebut. Hal ini dapat menghambat peningkatan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

B. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh di lapangan, sehingga peneliti

menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan penelitian. Maka ada beberapa poin hasil temuan yang bisa dilaporkan dalam bentuk tulisan antara lain sebagai berikut:

1. Penerapan Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

- a. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu DAK Reguler (prioritas/ target daerah), DAK Penugasan (kualitas nasional), dan DAK Afiriasi (daerah tertinggal). Dikarenakan Kabupaten Pamekasan tidak termasuk kedalam daerah tertinggal. Maka, Kabupaten Pamekasan hanya menggunakan 2 jenis Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu DAK Reguler dan DAK Penugasan.
- b. Tahap perencanaan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2022 dimulai pada bulan Januari tahun 2021 kemarin, dan sudah melakukan Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pada bulan Maret, sedang masuk pada tahapan sudah melewati Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, akan ada Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat beberapa kriteria, yaitu bangun jalan tidak boleh putus dan harus tuntas, dan apabila di suatu ruas jalan sudah pernah diusulkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maka di tahun selanjutnya tidak dapat diusulkan lagi.

- c. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan sudah lumayan besar untuk membantu perkembangan daerah di Pamekasan. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan baku anggaran tiap tahunnya berbeda tergantung kebutuhan, kebutuhan itu diusul ke pusat dengan mengumpulkan OPD melalui program Krisna untuk mengusulkan dana DAK. Contoh, bidang air minum dibangun pengeboran mata air di Desa Bujhur, bidang pendidikan yaitu pengadaan buku dan rehabilitasi Perpustakaan Umum, dan bidang perumahan dan permukiman dengan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- d. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan tahun 2018-2020, diketahui bahwa secara garis besar terjadi peningkatan pada tahun 2019 dan di tahun 2020 mengalami penurunan terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang dipaparkan, jika di tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menyatakan bahwa penyaluran dan penggunaan transfer daerah difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 guna untuk memfokuskan pada penanganan COVID-19 di bidang kesehatan.
- e. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2020 Apabila tidak terjadi pandemi COVID-19, Kabupaten Pamekasan pada bidang infrastruktur berfokus pada pembangunan wilayah Pamekasan. Pada bidang jalan bagian wilayah tengah-utara, dari Pegantenan-Batu Marmar. Bidang air minum berfokus pada pengendalian pengentasan stunting, dan

juga sanitasi. Pada pembangunan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berfokus pada pembiayaan yang termasuk prioritas, seperti pendidikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan di Rumah Sakit Waru dan RSUD Slamet Martodirdjo, pelayanan dasar peningkatan kualitas puskesmas, ketersediaan obat, perpustakaan, KB, peningkatan kualitas jaringan irigasi, jalan yang berfokus pada jalan yang strategis, dan juga perikanan yang berfokus pada persediaan sarana dan prasarana (sarpras) seperti alat tangkap. Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan ini tidak begitu besar kurang lebih sekitar 80-90 Miliar.

2. Dampak Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

- a. Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan memiliki dampak baik yang dirasakan oleh masyarakat meskipun tidak dapat dipungkiri jika ada beberapa masyarakat yang masih belum merasakan adanya peningkatan yang signifikan.
- b. Dalam bidang air minum dampak yang dirasakan masyarakat dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini cenderung memberikan dampak yang cukup positif. Dengan meningkatnya dari segi kualitas fasilitas yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat Pamekasan, seperti pembangunan instalasi pengolahan air di Desa Samiran, pengeboran

sumber mata air di Desa Bhujur untuk pemenuhan air bersih dan kekeringan.

- c. Dalam bidang pendidikan dampak yang dirasakan masyarakat dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini terdapat bermacam-macam tanggapan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa dalam segi fasilitas bangunan dirasa masih kurang seperti yang dikatakan oleh Ibu Eny dan ada juga yang beranggapan bahwa fasilitas yang sedang dirasakan oleh Sherly dapat membantunya dalam menjalankan pendidikannya seperti halnya pada perpustakaan umum yang ada di Pamekasan.
- d. Dalam bidang kesehatan dampak yang dirasakan masyarakat dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini juga mendapat berbagai macam pendapat dan tanggapan, terdapat masyarakat yang menilai dalam bidang kesehatan ini sudah memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dengan adanya sarana prasarana yang mendukung mulai dari ruang isolasi dan peralatan medis seperti APD di masa pandemi ini. Ada juga yang mengatakan dampak yang masih kurang baik dalam pelayanan dan alat kesehatan yang dirasa belum optimal dalam menangani pasien.
- e. Dalam bidang infrastruktur jalan dampak yang dirasakan masyarakat dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini cenderung berdampak yang kurang baik pada

masyarakat Pamekasan, dikarenakan masih banyaknya jalan-jalan yang rusak seperti di Desa Gugul Tlanakan dan Desa Trasak Larangan. Dilihat dari segi kualitas yang memberikan dampak kurang baik kepada masyarakat juga dalam segi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang infrastruktur jalan ini yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Disebabkan dengan adanya refocusing anggaran, dimana kegiatan yang semula digunakan untuk pembangunan kegiatan/ program pemerintah dipotong untuk penanganan pandemi COVID-19.

- f. Dalam bidang perumahan dan permukiman dampak yang dirasakan masyarakat dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini terkendala pada pengkontribusi program RTLH yang masih kurang tepat sasaran, masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di rumah yang hampir roboh dan tidak layak huni.

C. Pembahasan

Berdasarkan beberapa data yang peneliti temukan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka ada beberapa poin yang perlu dibahas oleh peneliti sebagaimana yang akan dijelaskan berikut:

1. Penerapan Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

Dana Alokasi Khusus dijelaskan dalam pasal 38 sampai dengan pasal 42 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah alokasi dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/ kabupaten/ kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.³²

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.³³

Pasal 162 UU No. 32/2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.³⁴

Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum, dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional. Berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

³² I Made Subawa, et al, 2005. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*. Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Wawasan, Denpasar, hlm. 124.

³³ *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah*, 76.

³⁴ *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, 120.

Maka Dana Alokasi Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dimulai dari perencanaan Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan (Musrenbang) tingkat kecamatan sampai kabupaten. Kemudian dilakukan penetapan Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIK) untuk menentukan nilai secara keseluruhan sesuai ketentuan Bappeda. Hal ini juga untuk mengakomodir kepentingan kecamatan dalam segala sector terutama infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.³⁵

Pada tahun 2004, pemerintah mengesahkan UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan UU ini, pada 20 Januari 2005 Bappenas dan Mendagri mengeluarkan Surat Edaran Bersama No. 0259/M.PPN/I/2005.050/166/SJ mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang yang dilaksanakan untuk menyusun perencanaan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan forum untuk menampung usulan masyarakat.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai penerapan kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan

³⁵ Karlina, Turniani Laksmiarti, Asep Kusnali, “Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 20, No. 2 (April, 2017): 73-81.

³⁶ Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi, “Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK),” Lembaga Penelitian SMERU (Januari, 2008): 33-34.

daerah di Kabupaten Pamekasan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus melewati beberapa sistem dan proses. Dapat diketahui jika proses perencanaan yang ada di Kabupaten Pamekasan sudah cukup baik, dimana masyarakat nantinya akan dilibatkan dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berawal dari tingkat desa.

Proses perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Pamekasan berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan. Dalam penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan memenuhi prinsip dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu peningkatan di beberapa bidang/ kegiatan yang berperan penting dalam perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dimana dalam penerapannya sendiri juga melalui tahap perencanaan.

Tahapan pengusulan dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus berdasarkan Kementerian Keuangan, yang pertama pada bulan Januari-Februari adanya review *baseline* dan penyusunan rancangan prioritas. Selanjutnya pada bulan Februari merupakan penentuan bidang/ sub bidang/ menu kegiatan dan target output/ outcome. Di bulan Maret-Mei adalah penyampaian usulan DAK Fisik melalui aplikasi Krisna DAK. Lalu di bulan Juni-Juli merupakan penilaian awal usulan DAK sesuai Pagu Indikatif. Agustus, sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK melalui aplikasi Krisna DAK dan penyusunan NK dan RAPBN 2020. Di bulan yang sama yaitu Agustus terjadi penilaian dan pengalokasian DAK Fisik sebelum

pembahasan dengan DPR. Bulan September-Oktober adalah pembahasan alokasi dan RUU APBN bersama DPR. Selanjutnya, di bulan Oktober-November dilakukannya penetapan alokasi DAK per daerah (perpres rincian APBN) dan penyusunan juknis DAK (Perpres). Yang terakhir, yaitu di bulan Desember adalah penetapan juknis DAK (Perpres) dan penyusunan rencana kegiatan dengan aplikasi Krisna DAK.³⁷

Tujuan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Antara lain adalah untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik yang menjadi prioritas nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah serta pelayanan antar sektor.³⁸

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK. 07/ 2006 Pasal 3 tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup.³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai penerapan kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan

³⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Proses Usulan Kegiatan dan Penganggaran DAK Fisik TA 2020 Serta Mekanisme Penyaluran DAK Fisik TA 2019* (Bandung, 25 April 2019), 23.

³⁸ Syaikhul Usman, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi, "Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)," Lembaga Penelitian SMERU (Januari, 2008): 20.

³⁹ Menteri Keuangan, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/ PMK. 07/ 2006 Tentang Penetapan Alokasi Dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2007*, Jakarta (Desember, 2006): 4.

daerah di Kabupaten Pamekasan sudah dapat meningkatkan pembangunan daerah yaitu dalam melaksanakan penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perumahan dan permukiman, bidang air minum, bidang sanitasi, bidang sentra industri kecil dan menengah, bidang pasar, dan bidang irigasi dalam kegiatannya di tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 meskipun pada tahun 2020 beberapa bidang yang dimaksud mengalami penurunan akibat imbas dari pandemi COVID-19.

Jadi penerapan Dana Alokasi Khusus dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan memenuhi prinsip dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah dimana pembangunan daerah yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) meski mengalami penurunan di tahun 2020, akan tetapi mengalami peningkatan dalam hal infrastruktur yang ada dalam bidang tertentu.

Dasar hukum pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di setiap daerah didasarkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain Undang-Undang tersebut, dana perimbangan juga diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk setiap daerah dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan yang akan diberikan tiap tahun kepada setiap Kabupaten dan Kota yang akan menerima pengalokasian Dana Alokasi Khusus dari dana APBN. Sedangkan penetapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pedoman

umum pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang akan diberikan tiap tahun anggaran kepada masing-masing daerah.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan bahwa pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sendiri diarahkan pada kegiatan yang mendorong untuk peningkatan pembangunan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat Kabupaten Pamekasan dengan umur ekonomis yang panjang. Sebagai contoh: rehabilitasi gedung sekolah/ ruang kelas, pengadaan/ rehabilitasi sumber dan sanitasi air bersih, serta peningkatan mutu sekolah dengan pembangunan/ penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan serta fasilitas pendidikan sekolah lainnya.

Adapun dalam pelaksanaan penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus memenuhi beberapa proses pengelolaan dimana bidang/ kegiatan yang diambil dan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui tahapan-tahapan yang dapat mendorong peningkatan pembangunan dan/ atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat Kabupaten Pamekasan. Selain itu, apabila pengusulan seluruh kegiatan yang di danai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ini disetujui, maka akan dilanjut dengan tahapan dan proses transfer daerah.

⁴⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Indonesia*. Cetakan ketujuh, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2004), hlm. 39.

Transfer ke daerah bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴¹ Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuain. Dana transfer ke daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Transfer Dana Perimbangan meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum, dan Transfer Dana Alokasi Khusus.⁴²

Seperti ditegaskan dalam UU No. 25/1999, bentuk transfer yang paling penting adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain bagi hasil. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu, tujuan transfer adalah mengurangi kesenjangan keuangan horizontal antar daerah, mengurangi

⁴¹ Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, 4.

⁴² Kementerian Keuangan, *Transfer Ke Daerah dan Dana Desa*, diakses dari www.dpjk.depkeu.go.id, pada tanggal 2 Juni 2021.

kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan publik antar daerah, dan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan penerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan sudah dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat Kabupaten Pamekasan meskipun dalam penerapan melalui transfer ke daerah mengalami penurunan dan tidak direalisasikan secara penuh.

Jadi, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan melalui transfer daerah mengalami penurunan di tahun 2020 dikarenakan penyaluran dan penggunaan transfer daerah difokuskan untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19. Maka dari itu di tahun 2020 beberapa bidang/ kegiatan mengalami penurunan penyederhanaan realisasi dana DAK. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 4.4.

2. Dampak Kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Pamekasan.

Dampak yang diharapkan dari adanya kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan yaitu untuk mendorong terwujudnya pertumbuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tentu harus diimbangi dengan adanya kebijakan sebagai

⁴³ Karlina, Turniani Laksmiarti, Asep Kusnali, “Kontribusi Dana Alokasi Khusus Terhadap IPKM dalam Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tapin dan Banjar Provinsi Kalimantan Selatan,” Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, Vol. 20, No. 2 (April, 2017): 73-81.

pendorong dalam mendukung kegiatan kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan.⁴⁴

Adapun dampak yang diharapkan dari adanya suatu kebijakan pada umumnya yaitu untuk menciptakan perubahan, khususnya dalam kehidupan masyarakat. Perubahan yang diharapkan oleh masyarakat dari adanya kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) meliputi tercapainya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya infrastruktur dimana masyarakat Pamekasan dapat dengan mudah mengakses hasil kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah baik dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lain sebagainya.

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang

⁴⁴ *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.*

akan datang. Proses dari sebuah pembangunan biasanya akan menimbulkan perubahan dan juga memiliki dampak positif maupun negatif bagi kehidupan masyarakat.⁴⁵

Dalam perkembangannya, keberadaan Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi semakin penting bagi pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh komponen utama dana perimbangan dalam berbentuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang pada umumnya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja birokrasi. Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah menjadi faktor penting dalam keseluruhan program pembangunan daerah pada khususnya.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa dampak dari adanya kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan yaitu memiliki dampak yang baik terhadap kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal ini melihat dari hasil observasi yang peneliti lakukan serta dampak positif yang dirasakan masyarakat Kabupaten Pamekasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Arah kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang air minum adalah mewujudkan akses air minum universal dan pemenuhan SPM atau Standar Pelayanan Minimum, serta mendukung program prioritas nasional. Tujuan dan sasaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang air minum yaitu untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang layak melalui penambahan

⁴⁵ Vina Maria Ompusunggu, "Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara," 18-19.

⁴⁶ Syaikhu Usman, M. Sulton Mawardi, Adri Poesoro, Asep Suryahadi, "Mekanisme dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)," Lembaga Penelitian SMERU (Januari, 2008): 32.

jumlah SR atau Sambungan Rumah kepada rumah tangga, terutama pada masyarakat yang berpenghasilan rendah.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang air minum memberikan dampak yang cukup positif. Dengan meningkatnya dari segi kualitas fasilitas yang dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat Pamekasan, seperti pembangunan instalasi pengolahan air di Desa Samiran, pengeboran sumber mata air di Desa Bhujur untuk pemenuhan air bersih dan kekeringan.

Jadi, dampak yang diberikan dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang air minum ini sesuai dengan arah kebijakan yang berlaku untuk pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan pembangunan daerah di Pamekasan.

Adapun dalam bidang pendidikan tujuan utama digulirkannya kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah membiayai kegiatan-kegiatan khusus untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber daya. Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang pendidikan yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu.⁴⁸

⁴⁷ Kementerian Keuangan, *Lampiran I Bidang Air Minum*, diakses dari www.dpj.k.depkeu.go.id, pada tanggal 15 Juni 2021.

⁴⁸ J. M. Tedjawati, "Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 17, Nomor 5 (September, 2011): 609.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang pendidikan terdapat bermacam-macam tanggapan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa dalam segi fasilitas bangunan dirasa masih kurang dan ada juga yang beranggapan bahwa fasilitas yang sedang dirasakan oleh Sherly dapat membantunya dalam menjalankan pendidikannya seperti halnya pada perpustakaan umum yang ada di Pamekasan.

Maka dalam bidang pendidikan mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini memunculkan berbagai macam tanggapan masyarakat. Sebagian sudah berdasarkan kebijakan DAK, dimana membiayai kegiatan khusus untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan, seperti pada pembangunan proyek rehabilitasi di SMP Negeri 8 Pamekasan dan juga rehabilitasi perpustakaan umum. Hal itu dilakukan agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana demi terciptanya kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Pamekasan.

Dana Alokasi Khusus di bidang kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁴⁹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan

⁴⁹ *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, 2.*

daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang kesehatan ini juga mendapat berbagai macam pendapat dan tanggapan, terdapat masyarakat yang menilai dalam bidang kesehatan ini sudah memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dengan adanya sarana prasarana yang mendukung mulai dari ruang isolasi dan peralatan medis seperti APD di masa pandemi ini. Ada juga yang mengatakan dampak yang masih kurang baik dalam pelayanan dan alat kesehatan yang dirasa belum optimal dalam menangani pasien.

Maka, dalam bidang kesehatan mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan ini dalam hal pelayanan rumah sakit dan alat kesehatan masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada dan belum memenuhi kesejahteraan masyarakat Pamekasan. Seringnya pasien dirujuk ke rumah sakit di luar kota dengan berbagai macam permasalahan, seperti penanganan yang kurang profesional, alat kesehatan yang masih menunggu giliran dan bergantian dengan pasien yang lain. Berbeda dengan penuturan Noviana dimana alat kesehatan seperti APD yang masih terus dibutuhkan karena APD tersebut hanya dipakai 1 kali dan tidak bisa dipakai lagi, maka dari itu rumah sakit terus membutuhkan suplai pengadaan alat APD.

Dalam bidang infrastruktur jalan yaitu meningkatkan konektivitas nasional untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata.⁵⁰

⁵⁰ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 Pasal 6 Tentang Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, 8.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang infrastruktur jalan cenderung berdampak yang kurang baik pada masyarakat Pamekasan, dikarenakan masih banyaknya jalan-jalan yang rusak seperti di Desa Gugul Tlanakan dan Desa Trasakan Larangan. Dilihat dari segi kualitas yang memberikan dampak kurang baik kepada masyarakat juga dalam segi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang infrastruktur jalan ini yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Disebabkan dengan adanya refocusing anggaran, dimana kegiatan yang semula digunakan untuk pembangunan kegiatan/ program pemerintah dipotong untuk penanganan pandemi COVID-19.

Jadi, dampak yang diberikan dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang infrastruktur jalan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada dengan masih banyaknya ruas-ruas jalan yang rusak dan belum dilakukan perbaikan. Pembangunan dalam bidang infrastruktur jalan ini agar dapat meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan dan meningkatkan akses-akses ke daerah potensial di Kabupaten Pamekasan.

Dalam bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam rangka memiliki/ menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas dan pembangunan baru sebagai upaya pencegahan serta penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh

di perkotaan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh di daerah tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau-pulau kecil dan terluar.⁵¹

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti mengenai dampak kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang perumahan dan permukiman cenderung berdampak kurang baik dengan masih banyaknya masyarakat sekitar yang kurang mampu dan benar-benar tinggal dalam rumah yang tidak layak belum memperoleh bantuan dari proyek RTLH atau Rumah Tidak Layak Huni ini. Terutama peneliti melihat di kawasan-kawasan Pademawu dimana masih banyaknya warga yang tinggal dalam kondisi rumah yang terbuat dari anyaman bambu, triplek, dan atap yang sudah banyak bocor belum terdaftar dari penerima bantuan proyek RTLH tersebut.

Jadi, dampak yang diberikan dari kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pamekasan dalam bidang perumahan dan permukiman ini tidak sesuai dengan peraturan yang mengatakan untuk meningkatkan akses masyarakat yang kurang mampu dalam rangka memiliki dan menempati rumah yang layak huni. Namun, di Kabupaten Pamekasan ini masih terkendala pada pengkontribusi program RTLH yang kurang tepat sasaran, masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu dan tinggal di rumah yang hampir roboh dan tidak layak huni. Hal ini dapat menghambat peningkatan pembangunan daerah dalam mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

⁵¹ *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2016 Pasal 6 ayat 1 Tentang Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur*, 9.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak dari adanya kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembangunan daerah yang sangat dirasakan oleh masyarakat seperti adanya peningkatan infrastruktur dalam beberapa bidang/ kegiatan. Dan juga tidak menutup kemungkinan adanya dampak yang kurang memuaskan masyarakat terhadap infrastruktur pelayanan publik yang ada di Kabupaten Pamekasan.